

## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DAN PROGRAM PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING* PADA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (DP2KBP3A) KABUPATEN SUMBAWA

Anggraini<sup>1</sup>, Ahmad Yamin<sup>2\*</sup>, dan Geatriana Dewi<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Manajemen Inovasi, Sekolah Pascasarjana, Universitas Teknologi Sumbawa, Indonesia

<sup>2</sup>Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Teknologi Sumbawa, Indonesia

<sup>3</sup>Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Teknologi Sumbawa, Indonesia

*Corresponding author:* [ahmad.yamin@uts.ac.id](mailto:ahmad.yamin@uts.ac.id)

### ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih tingginya angka stunting di Kabupaten Sumbawa sehingga Pemerintah membuat kebijakan penurunan stunting. Diharapkan dengan adanya implementasi kebijakan penurunan stunting bisa menekan angka stunting di Kabupaten Sumbawa. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Deskriptif Kualitatif. Teknik pengumpulan datanya yaitu Observasi, Wawancara dan Dokumentasi., dengan informan kunci seperti Pihak DP2KBP3A, Pihak Dinas Kesehatan, Puskesmas. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan penurunan stunting di kabupaten Model Konseptual menggunakan teori Edward III dari aspek; Komunikasi, Sumber Daya, Sikap Pelaksana, dan Struktur Birokrasi. Dan untuk mengetahui program percepatan penurunan stunting di DP2KBP3A Kabupaten Sumbawa. Hasil penelitian dilihat melalui aspek Komunikasi, sumberdaya, disposisi/sikap pelaksana, dan struktur birokrasi, akan tetapi dalam hal ini dapat diketahui dalam implementasi kebijakan percepatan penurunan stunting di kabupaten adalah komunikasi terkait sosialisasi, kejelasan informasi yang disampaikan, Sumberdaya yang ditugaskan memiliki kompetensi yang sesuai akan tetapi kekurangan jumlah, SOP pelayanan yang diberikan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan, Disposisi menjamin motivasi kerja dengan pemberian reward. Kesimpulan yang dapat diambil dari Penelitian ini adalah implementasi kebijakan Percepatan penurunan stunting di DP2KBP3A Kabupaten Sumbawa berjalan maksimal, hal ini dapat dilihat dari segi komunikasi, Transmisi informasi, Standar Operasional Prosedur (SOP), Disposisi. Sedangkan Program percepatan penurunan stunting di Dinas P2KBP3A, adalah Peningkatan Mutu Gizi Individu, Keluarga dan Masyarakat, Melaksanakan upaya bersama untuk menurunkan stunting, Upaya penurunan stunting dilaksanakan sesuai dengan Strategi Pendidikan Kesehatan dan Gizi Kemandirian Keluarga, Percepatan Penurunan Stunting Melalui Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS), Gerakan 1000 HPK Percepatan Penurunan Stunting oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa.

**Kata Kunci:** Implementasi Kebijakan; Program Penurunan *Stunting*.

### ABSTRACT

*This research was motivated by the high stunting rate in Sumbawa Regency so that the Government made a policy to reduce stunting. It is hoped that the implementation of stunting reduction policies can reduce stunting rates in Sumbawa Regency. The purpose of this study is to determine how to implement stunting reduction policies in Conceptual Model districts using Edward III theory from aspects; Communication, Resources, Position/Attitude of Implementers, and Bureaucratic Structure. And to find out the stunting reduction acceleration program at DP2KBP3Sumbawa Patent. This research uses a Qualitative Descriptive approach method. The data collection techniques are Observation, Interview and Documentation., with key informants such as the DP2KBP3A Party, the Health Office, the Puskesmas. The results of the research are seen through aspects of communication, resources, positions / attitudes of implementers, and bureaucratic structures, but in*

*this case it can be seen that in the implementation of the policy of accelerating stunting reduction in districts is communication related to socialization, the formation of a special team to implement policies to accelerate stunting reduction so that the responsibility of employees has a basis in every implementation of their duties. The obstacle faced is still the lack of public awareness related to stunting prevention. The conclusion that can be drawn from this study is that the implementation of the stunting reduction policy in DP2KBP3A Sumbawa Regency is running optimally, this can be seen in terms of communication in socializing the program has run in accordance with the rules so that it has been maximally implemented so that the delivery of information can be said to be maximum. Aspects of resources, staff resources in the Population Control Office, Family Planning, Women's Empowerment and Child Protection and related OPDs, namely the Sumbawa Regency Health Office and Puskesmas are adequate. SOPs in the implementation of the program have been implemented and the distribution of authority or responsibility of each existing staff because there is the appointment of a special team that coordinates in implementing stunting reduction policies. Intensive provision to stunting reduction policy implementers provides motivation in working. And establish cooperation with leading sectors in stunting development. And the inhibiting factor, namely the location of the case is too wide so that there are loci that still need easier access, There are still many people who lack awareness, especially adolescents, and limited budgets.*

**Keywords:** Policy Implementation; Stunting Reduction..

## 1. PENDAHULUAN

Stunting merupakan masalah gizi utama yang mempengaruhi kehidupan sosial dan ekonomi. Keterbelakangan pertumbuhan juga dapat terjadi saat janin dalam kandungan karena ibu tidak mendapatkan cukup protein selama kehamilan, dan kondisi lingkungan juga dapat terpengaruh. Masalah kekurangan energi protein (KEP) merupakan salah satu masalah gizi utama yang dapat mempengaruhi proses tumbuh kembang anak. Defisiensi energi dan protein yang berkepanjangan menyebabkan terhambatnya pertumbuhan pada anak kecil (Hardiansyah et al., 1992).

DP2KBP3A Sumbawa merupakan lembaga kesehatan yang mempunyai misi menetapkan pedoman teknis di bidang kesehatan, oleh karena itu DP2KBP3A Sumbawa merupakan lembaga kesehatan yang mempunyai misi menetapkan pedoman teknis di bidang kesehatan, mempunyai tugas meningkatkan mutu kesehatan jasa. Strategi untuk mengurangi stunting, termasuk langkah-langkah organisasi, kegiatan yang dilaksanakan, dan sumber daya yang dipergunakan.

Pencegahan dan pengendalian stunting memerlukan pendekatan yang komprehensif dan terpadu. Perintah Eksekutif Nomor 42 Tahun 2013 merupakan sebuah strategi Scaling Up Nutrition (SUN) multisektoral yang memerlukan koordinasi kuat baik di tingkat pusat maupun daerah. Penyebaran dan advokasi informasi kepada pemangku kepentingan di tingkat yang sama dan pemangku kepentingan lainnya di seluruh sektor sehingga mereka dapat diberdayakan untuk mempertanggungjawabkan dan meningkatkan status gizi masyarakat pada tingkat yang sistemis, serta inisiatif pelatihan dan pendidikan. itu. Selain itu, intervensi yang penting adalah penguatan budaya 1000 HPK dalam kehidupan sosial masyarakat dan pelaksanaan kursus pengetahuan dan edukasi singkat bagi ibu-ibu sebelum hamil atau calon pengantin sebagai upaya preventif. Masa Selama kehamilan, menjaga pertumbuhan dan perkembangan kognitif sejak trimester pertama pembentukan janin. Prevalensi stunting di Sumbawa pada tahun 2019 hingga 2023 disajikan pada Tabel di bawah ini.

**Tabel 1.1**  
**Presentase Stunting Kabupaten Sumbawa Tahun 2019 - 2023**

| No | Tahun | % Stunting |
|----|-------|------------|
| 1  | 2019  | 13,5%      |
| 2  | 2020  | 10,91%     |
| 3  | 2021  | 8,39%      |
| 4  | 2022  | 8,11%      |
| 5  | 2023  | 8,11%      |

*Sumber : DP2KBP3A Kabupaten Sumbawa (2023)*

## 2. METODOLOGI

### 2.1. Waktu dan Tempat

Dalam melakukan Penelitian ini, Penulis Melakukan Penelitian dengan mengambil lokasi di Kantor Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa jalan Durian Nomor 9 Kelurahan Uma Sima Kecamatan Sumbawa.

### 2.2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif pendekatan kualitatif. Ini adalah penyelidikan menyeluruh terhadap seseorang, organisasi, program kegiatan, dan lain-lain dalam jangka waktu tertentu, yang tujuannya adalah untuk memperoleh gambaran atau gambaran lengkap dan rinci tentang entitas tersebut. Hal ini menciptakan data yang dapat dianalisis untuk mengembangkan teori

### 2.3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan tiga teknik pengumpulan data:

1. Observasi  
Observasi yaitu pengamatan langsung pada tempat penelitian untuk memperoleh keterangan lebih rinci mengenai data yang diteliti. Permasalahan terungkap melalui penelitian strategis Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa dalam menekan laju penderita stunting kabupaten Sumbawa.
2. Wawancara  
Wawancara adalah suatu cara pengumpulan data yang dilakukan dengan cara menanyakan pertanyaan kepada seseorang, baik informan maupun responden, mengenai sesuatu hal yang sedang diselidiki. Hal ini dapat dicapai melalui percakapan pribadi. Wawancara dapat dilakukan dengan menggunakan panduan wawancara atau dengan mengajukan pertanyaan langsung. Menurut Patton, proses wawancara dengan menggunakan pedoman wawancara umum melibatkan identifikasi masalah yang perlu ditangani tanpa menentukan urutan pertanyaan, atau bahkan dalam bentuk pertanyaan eksplisit dalam beberapa kasus. Pedoman wawancara umum yang mencantumkan topik-topik tertentu akan disediakan untuk wawancara.
3. Dokumentasi  
Dokumentasi adalah suatu cara memperoleh data dari buku-buku dan referensi lain yang sesuai dengan penelitian yang dilakukan penulis. Merekam dengan mengambil foto juga dimungkinkan.

### 2.4. Informan

Topik ini mempunyai dampak yang signifikan terhadap penelitian yang dilakukan. Informan penelitian ini antara lain: Kepala Dinas, Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa Kabupaten Sumbawa Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Dinas Kesehatan, Kepala seksi pelayanan puskesmas.

### 2.5. Teknik Analisa Data

Pada saat wawancara peneliti menganalisis jawaban responden. Setelah dilakukan analisis, apabila jawaban responden masih kurang memuaskan peneliti, maka peneliti dapat terus mengajukan pertanyaan sampai batas tertentu, atau jika ia dapat memperoleh jawaban yang memuaskan maka ia akan mempunyai data yang dianggap dapat dipercaya.

Langkah-langkah analisis data setelah pengumpulan adalah sebagai berikut:

1. Reduksi Data  
Reduksi data juga melibatkan peringkasan dan pemulihan rincian-rincian penting yang dianggap penting dan perlu sehingga data yang direduksi memberikan gambaran yang lebih jelas dan memudahkan pengumpulan data lebih lanjut oleh peneliti.
2. Menyajikan Data  
Setelah mereduksi data, langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Langkah selanjutnya

adalah menyajikan data sehingga mempunyai informasi untuk menarik kesimpulan. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat berupa uraian singkat, diagram, dan diagram alur.

### 3. Menarik/Memverifikasi Kesimpulan

Langkah selanjutnya dalam analisis data kualitatif adalah menarik dan menguji kesimpulan. Sekalipun kesimpulan yang diambil peneliti pada tahap awal masih bersifat tentatif, kemungkinan besar kesimpulan tersebut akan berubah jika tahap pengumpulan data selanjutnya tidak menemukan bukti kuat yang mendukung kesimpulan tersebut. Namun apabila kesimpulan yang dikemukakan peneliti pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten pada saat peneliti kembali ke lapangan dan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang disampaikan dapat diandalkan.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1 Impelementasi Kebijakan dan Program Percepatan Penurunan Stunting pada Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa

Kajian mendalam yang dilakukan peneliti bersama Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Peremberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2KBP3A) Kabupaten Sumbawa. Kegiatan dilakukan melalui pemberian Peningkatan kecerdasan anak, cara meningkatkan kecerdasan anak sesuai usia, dan Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa memberikan materi mengenai stunting, penyebab dan proses penanggulangannya serta kerjasama dengan puskesmas.

“Ya, kami sedang memantau desa. Karena kami memiliki personel di lokasi untuk memantau langsung kegiatan yang dilakukan. Program baru ini akan diterapkan di semua desa, tidak hanya desa stunting, dan akan melakukan stunting mulai dari awal masa pertumbuhan remaja hingga pencegahan kelahiran. Iya, pada informasi pusat konseling kelompok, program ini bernama Youth Development dan kami melakukan interaksi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa pada bulan November 2018 untuk mempelajari cara meningkatkan kecerdasan anak dan bagaimana pertambahan usia anak serta memberikan materi tentang cara mengajarkan kecerdasan sesuai usia. . Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa memberikan materi tentang cara mencegah stunting, penyebab stunting, dan cara mengatasinya. Oleh karena itu, terjadi kerja sama antar otoritas untuk menurunkan angka stunting.”

“Kami melakukan kegiatan sesuai dengan peraturan yang ada, menerapkan intervensi nutrisi khusus dari bidang kesehatan dan mendonasikan 30%. Kegiatan pertama yang akan kami lakukan adalah memberikan suplemen darah kepada remaja putri (Fe). anak usia sekolah mulai dari usia 11 atau 12 tahun hingga 18 tahun dan siswa sekolah menengah atas. Kami juga memberikan total 90 tablet zat besi kepada ibu hamil. Kami juga memberikan dukungan nutrisi tambahan kepada ibu hamil yang menderita kekurangan energi kronis. Yang ketiga, kegiatan pertukaran dan penyuluhan dilakukan di desa-desa di daerah stunting, kami memberikan informasi cara mengatasinya, penyebab stunting, dan fokus pada kehumasan selama kehamilan. Disarankan untuk berkonsultasi dengan dokter pada saat persalinan, dengan memberikan kelambu pada ibu hamil, memberikan makanan tambahan pada ibu dengan kekurangan protein energi kronis (KEK), dan dengan menimbang berat badan ibu dan bayi imunisasi dasar lengkap, pelaksanaan pengenalan menyusui dini (IMD), dan anjuran pemberian ASI eksklusif dan pemberian susu tambahan hingga 24 bulan masa menyusui (MP-ASI) di puskesmas tempat intervensi.”

Berdasarkan hasil studi wawancara mendalam yang dilakukan peneliti dengan Kabid pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa yang merupakan rekan kerjasama Dinas P2KBP3A, aktivitas awal pemberian tablet suplemen suplai darah berkontribusi sebesar 30% dalam menurunkan stunting melalui penerapan nutrisi spesifik (FE) 2018 Untuk remaja putri Obat ini diberikan kepada anak usia sekolah sejak menarche sekitar usia 12 tahun hingga usia 18 tahun, yaitu siswa SMP dan SMA.

Selanjutnya pemberian tablet tambahan darah (Fe) pada ibu hamil dilanjutkan dengan total 90 tablet yang diberikan khusus pada ibu hamil, dilanjutkan dengan pemberian tambahan nutrisi pada ibu hamil yang menderita gangguan kekurangan energi kronik (IBD). Sedangkan kegiatan sosialisasi dan penyuluhan dilakukan di desa-desa tempat terjadinya stunting, namun penekanannya adalah pada sosialisasi kepada masyarakat melalui pemberian materi mengenai penyebab, pencegahan, penanggulangan, dan topik-topik stunting lainnya. Profilaksis individu biasanya ditargetkan di pusat kesehatan masyarakat.

Bidang Kesehatan Keluarga Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Peremberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2KBP3A) Wilayah Sumbawa Pemantauan dilakukan beberapa kali dalam setahun, misalnya untuk Kelompok Pembinaan Keluarga Anak Usia Dini (BKB) sebulan sekali; Kegiatan akan terus dipantau oleh layanan P2KBP3A yang ada di lokasi. Semua program yang dilaksanakan tidak dievaluasi. Namun derajat keterbelakangan pertumbuhan yang terjadi dapat ditentukan berdasarkan hasil penelitian dasar (RISKESDAS).

“Ya, kami memantau desa.” Ada petugas di lapangan yang memantau langsung kegiatan yang dilakukan, seperti Kelompok Bina Bayi dan Keluarga (BKB). Dipantau secara langsung. Bagaimana kabar keluargamu? Kami lebih mudah mendapatkan informasi karena ada petugas polisi di lokasi kejadian. Namun jika belum ada evaluasi, maka 4.444 program tersebut akan dilaksanakan seluruhnya karena tidak ada yang mau mengevaluasi. Namun peneliti dari Risk Esda akan hadir pada akhir tahun untuk melihat apakah stunting telah berkurang.”

Selain monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa, Dinas Kesehatan dan Puskesmas juga melakukan monitoring dan evaluasi seperti hasil wawancara yang dilakukan. Berdasarkan hasil wawancara mendalam yang dilakukan peneliti dan tanggapan warga Sumbawa Program Gizi Puskesmas, dilakukan pemantauan sebagai berikut: Memberikan tablet produk darah kepada remaja putri dan ibu hamil. Mereka jarang meminum tablet produk darah dan memerlukan pemantauan dan instruksi terus menerus untuk meminumnya.

“Iya, kami pantau Pemberian tablet darah. Nanti harus diawasi, kalau tidak, mereka tidak akan minum tablet darah.” Jadi kami terus memantau mereka dan memberi mereka instruksi serta memberi tahu mereka bahwa penting untuk meminum pil untuk meningkatkan aliran darah. “Dari segi evaluasi, kami belum tahu bagaimana hasil dari karena kami belum mengevaluasi.”

### **3.2 Program-Program Percepatan Penurunan Stunting yang dilakukan Oleh Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa**

#### **1. Peningkatan Mutu Gizi Individu, Keluarga dan Masyarakat**

“Kalau kita lebih fokus pada gizi sensitif ya, kalau kita meningkatkan kualitas gizi dengan meningkatkan sumber daya yang ada, maka kedepannya masyarakat bisa meningkatkan dan mengolah sumber daya yang ada, terutama air bersih.” Bersih.” air sulit didapat di Sumbawa khususnya daerah-daerah yang aksesnya susah dan letaknya terpencil.

Berdasarkan hasil wawancara mendalam yang dilakukan kepada Kepala Dinas oleh peneliti. Dinas Keluarga Berencana dan Pengelolaan Kependudukan Perlindungan Perempuan dan Anak (P2KBP3A) mulai dari meningkatkan sumber daya yang ada dan meningkatkan kualitas gizi memperhatikan Mengamankan sumber air dengan menggunakan teknologi maju.

“Bagi saya sebagai ahli gizi, kita perlu membantu masyarakat memahami makanan apa saja yang sehat. Kita memerlukan keberagaman dan kita perlu memastikan hal tersebut berhasil, bukan hanya melakukannya dengan cara seperti itu.” diet seimbang, bukan hanya makan.”

Berdasarkan hasil wawancara mendalam yang dilakukan peneliti dengan pemilik program gizi di Puskesmas Sumbawa, peningkatan mutu gizi dilakukan dengan memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai: Menentukan jenis makanan yang sebaiknya dikonsumsi, mengedukasi makanan bergizi melalui para eksekutif, dan membantu masyarakat memahami cara mencapai pola makan seimbang.



2. Melaksanakan upaya bersama untuk menurunkan stunting

“Ya, pada bulan November hingga Desember, akan melakukan kampanye di desa-desa. November lalu, kami membagikan stiker anti stunting ke daerah-daerah yang terdapat kasus stunting. Kami juga bekerja sama dengan desa untuk meningkatkan kesadaran tentang pencegahan stunting. Mari kita atasi stunting dan membuat masyarakat desa mengerti.”

Berdasarkan hasil tersebut, peneliti melakukan survei pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak (P2KBP3A) Kabupaten Sumbawa melakukan pembagian stiker anti stunting kepada masyarakat, kepedulian terhadap anak stunting, dan pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat di tingkat desa untuk meningkatkan pemahaman tentang pencegahan dan pengobatan stunting. Kegiatan dilakukan di desa.

“Aksi bersama desa-desa ini kami laksanakan, bekerja sama untuk menurunkan angka stunting di beberapa desa, khususnya di wilayah kerja puskesmas ini. Kami juga menghimbau agar para pelaku lebih memberikan perhatian dan masyarakat stunting bukan disebabkan oleh faktor genetik, melainkan merupakan masalah kesehatan yang perlu mendapat perhatian masyarakat. Saya ingin mereka memahami bahwa hal ini disebabkan oleh hal tersebut. “Kami juga membagikan selebaran dan melakukan upaya lintas sektor, karena mengurangi stunting memerlukan upaya di banyak sektor, bukan hanya nutrisi.”

Berdasarkan hasil wawancara mendalam yang dilakukan peneliti dengan pemilik program gizi Puskesmas Sumbawa, pihak puskesmas menghubungi pihak puskesmas. Komunitas pusat akan bekerja sama dengan desa sebagai aksi kolektif untuk mengurangi stunting di desa, memberikan perhatian lebih kepada masyarakat sekitar dan memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa stunting sebenarnya disebabkan dan bukan karena faktor genetik. masalah kesehatan. Pembagian brosur dan kerjasama lintas sektor juga merupakan salah satu terobosan yang dilakukan Puskesmas dan stakeholder lainnya.

3. Strategi Pendidikan Kesehatan dan Gizi Kemandirian Keluarga

“Edukasi yang kami berikan kepada keluarga sepertinya hanya diberikan melalui sosialisasi di masyarakat. Ya, kegiatan kami lebih bersifat kunjungan ke rumah-rumah, dialog.”

Berdasarkan hasil wawancara mendalam yang dilakukan oleh peneliti bahwa pendidikan dan pelatihan masyarakat sudah diberikan kepada keluarga.

“Kami melakukan tugas pendidikan. Jadi ketika mereka ke Posyandu, kami menjelaskan gizi dan memberikan pendidikan kesehatan di sana.”

Berdasarkan hasil wawancara mendalam yang dilakukan peneliti dengan tenaga program gizi di Puskesmas Sumbawa, Puskesmas telah melakukan upaya penurunan stunting dengan memberikan penyuluhan gizi di puskesmas terpadu.

4. Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)

“Bagaimana kita bisa mempercepat kolaborasi dengan berbagai sector. Dan bukan hanya pusat kesehatan yang perlu bekerja sama seperti masyarakat yang memang harus memiliki kesadaran akan pentingnya gerakan masyarakat hidup sehat, karena ini bukan untuk orang lain, melainkan untuk diri sendiri dan keluarganya.”

Berdasarkan hasil wawancara mendalam yang dilakukan peneliti dengan apartur nutrisi di Puskesmas Sumbawa, penurunan stunting memerlukan komitmen semua pihak, maka Kita perlu melakukan percepatan di seluruh sektor, tidak hanya di bidang kesehatan.

5. Gerakan 1000 HPK Percepatan Penurunan Stunting oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa

“Konsep 1000 HPK sebenarnya merupakan kegiatan rutin yang dilakukan setiap saat oleh layanan kesehatan, seperti pemberian 1000 HPK kepada ibu hamil, pemberian tablet FE kepada ibu hamil, dan pemberian PMT kepada ibu hamil memantau status gizi ibu hamil. Kami terus memantau pembukuan KIA bahkan setelah melahirkan. ”

Gerakan 1000 HPK sudah menjadi aktivitas sehari-hari di sektor ini. Ibu hamil diberikan suplemen darah (Fe) sejak awal untuk meningkatkan kesehatannya, pemberian suplemen gizi (PMT) selama kehamilan, dan pemantauan terus menerus dilakukan menggunakan Buku Panduan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) setelah melahirkan.

### 3.3 Pembahasan

#### 3.3.1 Implementasi Kebijakan Penanganan Stunting di Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, penerapan strategi stunting di kabupaten Sumbawa berhasil dibuktikan dengan wawancara, observasi dan data dokumenter seperti:

1. Komunikasi :  
Komunikasi mengacu pada penyebaran informasi dari pengambil keputusan politik ke lembaga pelaksana kebijakan dan kelompok sasaran mereka. Pengajuan terkait implementasi Kebijakan Penanggulangan Stunting di Kabupaten Sumbawa akan dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa dan akan dikomunikasikan kepada seluruh Pengelola Puskesmas di Kabupaten Sumbawa dan disampaikan ke masing-masing daerah melalui aparatur nutrisi Puskesmas se kabupaten sumbawa. Masyarakat disetiap wilayah kerja Puskesmas.
2. Kejelasan Transmisi informasi atau perintah yang diterima target program harus benar-benar jelas dan tidak membingungkan. Indikator kejelasan dalam pelaksanaan program penanganan stunting sejalan dengan teori implementasi Edward III yang menyatakan bahwa petunjuk pelaksanaan kebijakan harus jelas dan bebas dari kebingungan sehingga pelaksana kebijakan dapat memahami dan menerima kebijakan yang kita lakukan. Dalam program percepatan stunting ini pembahasannya bagus karena dalam pelaksanaannya sudah terdapat pedoman seperti teknis tata cara pelaksanaannya, dan juga sudah terdapat pedoman hukum yang mengatur pelaksanaan program penanganan stunting ini.
3. Sumber Daya
  - a. Sumber Daya Manusia (Staf)  
Sumber Daya Manusia (Sumber Daya Manusia) merupakan salah satu faktor efektif tidaknya kebijakan. Berkaitan dengan hal tersebut, pelayanan yang berkualitas dan memuaskan tentu menjadi dambaan setiap warga negara pengguna pelayanan kesehatan. Keberhasilan implementasi khususnya program manajemen stunting ini memerlukan kecepatan dan pelayanan prima dari para pelaksana kebijakan. Namun hal ini tidak selalu efektif jika kurangnya staf yang mempunyai pengetahuan langsung mengenai kebijakan yang dikembangkan. Implementasi yang sukses memerlukan peningkatan jumlah karyawan yang berkualitas.
  - b. Sumber daya Wewenang  
Sumber daya pendukung untuk memperkuat implementasi kebijakan memerlukan basis otoritas untuk implementasi tersebut. Dalam hal ini kewenangan yang diberikan oleh pimpinan dalam hal ini Bupati Sumbawa kepada dinas terkait dalam hal ini pelayanan P2KBP3A dan pelayanan kesehatan, serta puskesmas sebagai pelaksana langsung sepenuhnya berada di tangan dan diformalkan. Awalnya. Hasil wawancara dan observasi lapangan menunjukkan adanya kerjasama yang sangat baik dari level bawah hingga manajemen puncak, dan hubungan hierarkis tetap dihormati. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari duplikasi kemampuan.
  - c. Sumber Daya Informasi  
Informasi merupakan sumber daya terpenting berikutnya dalam implementasi kebijakan. Informasi dalam hal ini adalah pemahaman dan pengetahuan tentang apa yang perlu dilakukan dan bagaimana melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan. Di Kabupaten Sumbawa sendiri, melalui Dinas Kesehatan dan DP2KBP3A, dilakukan pelatihan terhadap staf dan petugas gizi yang mengelola program pengobatan stunting di puskesmas. BIMTEK (bimbingan teknis) dan sesi pelatihan diadakan di negara bagian.

Berdasarkan hasil wawancara dapat dikatakan sebagian masyarakat cukup puas terhadap pelayanan yang diberikan oleh petugas penanggung jawab stunting di wilayah kerja Puskesmas Kabupaten Sumbawa

- d. Sumber Daya Sarana dan Prasarana  
Peralatan fisik merupakan sumber daya penting yang mendukung implementasi. Sekalipun pelaksana kebijakan memiliki staf yang cukup, memahami apa yang perlu dilakukan, dan mempunyai wewenang untuk melaksanakan tugas, tanpa sarana dan prasarana yang memadai, implementasi yang direncanakan tidak akan terlaksana secara efektif. Bahkan bekerja. Berdasarkan hasil wawancara, penulis menyimpulkan bahwa Kabupaten Sumbawa masih kekurangan fasilitas untuk melaksanakan penanganan stunting dalam hal transportasi khususnya ambulans. Oleh karena itu, pemerintah diharapkan memperbanyak jumlah ambulans dan fasilitas lainnya agar pencegahan stunting dan upaya lainnya dapat dilaksanakan sesuai harapan.
4. Birokrasi
  - a. SOP (*Standard Operating Procedures*) Adanya *Standard Operating Procedures* (SOP) memastikan bahwa kinerja suatu organisasi selalu diharapkan dapat diukur dari indikator-indikator dan pencapaian tujuan yang telah ditentukan, karena bersifat tidak langsung. Berisi petunjuk teknis baku kuantitatif dan mutu yang merupakan sarana untuk mencapai tujuan yang ditentukan. Berdasarkan hasil wawancara, penulis menyimpulkan bahwa Rencana Pelayanan Pengelolaan Kependudukan Keluarga dan Pelayanan Kesehatan serta Puskesmas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melaksanakan program ini sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.
  - b. Fragmentasi  
Fragmentasi dilakukan untuk memudahkan implementasi kebijakan. Sebab, kebijakan tidak bisa dicapai oleh satu orang saja, sehingga pembagian dan pembagian wewenang dilakukan untuk mencegah satu orang harus melakukan tugas yang tumpang tindih. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan penulis, pemerintah memberikan pelayanan yang maksimal untuk mencapai tujuan pencegahan stunting, namun terdapat permasalahan dalam implementasinya seperti kurangnya sumber daya manusia, kurangnya sarana dan prasarana, dan lain-lain. Ternyata masih banyak kendala. Dan rasa kebersamaan itu sendiri. Kendala-kendala tersebut harus segera diatasi untuk meningkatkan pelayanan dan mencapai tujuan tertentu.
5. Disposisi
  - a. Penunjukkan Birokrat  
Kebijakan hanya dapat dilaksanakan apabila mendapat dukungan dari birokrat yang memiliki kompetensi, integritas, dan loyalitas yang tinggi. Penempatan berkaitan dengan penempatan dan karakteristik perangkat. Penunjukan petugas pelaksana akan didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, meliputi keterampilan, kemampuan, dan latar belakang pendidikan. Tentu saja, semua pelaksana program memenuhi persyaratan, namun setiap orang harus memiliki lebih banyak pengalaman sehingga mereka dapat melaksanakan tugasnya dengan andal.
  - b. Insentif  
Insentif adalah manfaat atau biaya tertentu yang memotivasi pelaksana untuk melaksanakan suatu kebijakan dengan benar. Pemberian insentif dapat meningkatkan kualitas produk kerja dan sikap para pelaksana kebijakan. Program penanganan stunting ini tidak hanya fokus pada penurunan angka stunting saja, namun juga menyukseskan kerjasama lintas sektoral dan lintas OPD, dalam hal ini pelayanan pengelolaan kependudukan, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak menjadi garda terdepan. Puskesmas Kabupaten Sumbawa, Dinas Pelayanan Kesehatan. Melalui insentif ini diharapkan OPD dan OPD peserta dapat bekerja sama dengan baik, bersinergi, dan bekerja sesuai misi dan fungsi masing-masing sehingga dapat menyukseskan pelaksanaan Penanganan Stunting.



#### 4.1.1 Program-Program Percepatan Penurunan Stunting yang dilakukan Oleh Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa

1. Peningkatan Mutu Gizi Individu, Keluarga dan Masyarakat  
Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas pola makan dan mengurangi stunting adalah dengan mendukung keluarga sadar gizi (KADARZI) selain itu, Kabupaten Sumbawa akan meningkatkan sumber daya yang ada dan meningkatkan kualitas gizi serta mengamankan sumber air dengan menggunakan teknologi maju dan juga melakukan peningkatan mutu gizi dilakukan dengan memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai: Menentukan jenis makanan yang sebaiknya dikonsumsi, mengedukasi makanan bergizi melalui para eksekutif, dan membantu masyarakat memahami cara mencapai pola makan seimbang.
2. Melaksanakan upaya bersama untuk menurunkan stunting  
Melaksanakan upaya kolaboratif atau inovatif untuk menurunkan stunting sesuai dengan Pelayanan Pengelolaan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Perlindungan Perempuan dan Anak (P2KBP3A) Kabupaten Sumbawa melaksanakan intervensi kolaboratif atau inovatif untuk menurunkan stunting sesuai dengan Puskesmas Sumbawa
3. Upaya penurunan stunting dilaksanakan sesuai dengan Strategi Pendidikan Kesehatan dan Gizi Kemandirian Keluarga  
Untuk program ini, yang dilakukan oleh Dinas P2KBP3A pendidikan dan pelatihan masyarakat sudah diberikan kepada keluarga. melakukan upaya penurunan stunting dengan memberikan penyuluhan gizi di puskesmas terpadu
4. Percepatan Penurunan Stunting Melalui Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)  
Program ini dilakukan dengan cara mengusulkan indikator aktivitas fisik masyarakat terkait stunting ini dikarenakan penurunan stunting memerlukan komitmen semua pihak, maka Kita perlu melakukan percepatan di seluruh sektor,
5. Gerakan 1000 HPK Percepatan Penurunan Stunting oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa

Program ini dilakukan dengan cara Ibu hamil diberikan suplemen darah (Fe) sejak awal untuk meningkatkan kesehatannya, pemberian suplemen gizi (PMT) selama kehamilan, dan pemantauan terus menerus dilakukan menggunakan Buku Panduan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) setelah melahirkan, penyuluhan Pembinaan Keluarga Terpadu (BKB) untuk Remaja serta pelaksanaan senam 1000 HPK ini dilaksanakan dengan pengawasan bidan desa.

#### 4. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, diketahui bahwa implementasi kebijakan stunting di Kabupaten Sumbawa telah dilaksanakan dengan baik oleh Dinas Kependudukan, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Sumbawa, salah satunya dengan melibatkan organisasi perangkat daerah yang menjadi rekan kerja Dinas P2KBP3A seperti Dinas Kesehatan serta puskesmas, yang memiliki peran yang tidak kalah pentingnya dalam mengimplementasikan kebijakan dan program penurunan stunting.

- a. Implementasi Kebijakan serta Program Percepatan Penurunan Stunting yang diterapkan oleh Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa, yaitu :
  - 1) Komunikasi dalam sosialisasi program dilakukan sesuai aturan dan dilakukan secara maksimal, sehingga dapat dikatakan penyampaian informasinya maksimal.
  - 2) Aspek sumber daya dan sumber daya manusia pada pelayanan pengelolaan kependudukan, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan OPD terkait yaitu pelayanan kesehatan kabupaten Sumbawa dan puskesmas sudah memadai.
  - 3) SOP pelaksanaan program telah ada dan telah ditunjuk tim khusus untuk mengkoordinasikan pelaksanaan strategi stunting sehingga wewenang dan tanggung jawab terbagi kepada setiap pegawai.

- 4) Menjamin motivasi kerja dengan memberikan upaya intensif untuk menurunkan stunting. Kami juga berkolaborasi dengan pemain industri besar dalam manajemen aksi.
- b. Program-program Percepatan Penurunan Stunting yang diterapkan oleh Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa, yaitu :
- 1) Peningkatan Mutu Gizi Individu, Keluarga dan Masyarakat.
  - 2) Melaksanakan upaya bersama untuk menurunkan stunting.
  - 3) Upaya penurunan stunting dilaksanakan sesuai dengan Strategi Pendidikan Kesehatan dan Gizi Kemandirian Keluarga.
  - 4) Percepatan Penurunan Stunting Melalui Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS).
  - 5) Gerakan 1000 HPK Percepatan Penurunan Stunting oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa.

## 5. DAFTAR PUSTAKA

- ACC/SCN. 2000. *The World Nutrition Situation*. Nutrition Throughout the life Cichle.Ganeva:WHO
- Aryastami, N. K. (2017). *Kajian Kebijakan dan Penanggulangan Masalah Gizi Stunting di Indonesia*. Buletin Penelitian Kesehatan, 45(4), 233–240.
- Ayuningtyas, D. (2014). *Kebijakan Kesehatan: Prinsip dan Praktik (1st ed.)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ayuningtyas, D. (2018). *Analisis Kebijakan Kesehatan: Prinsip dan Aplikasi (1st ed.)*. Depok: Rajawali Pers
- Bappenas. (2022, Februari 14). *Mengenal Studi Status Gizi Indonesia 2021*. Dipetik Juni 12, 2022, dari cegahstunting.id: <https://cegahstunting.id>
- BKKBN. (2021). *Antisipasi Generasi Stunting Guna Mencapai Indonesia Emas 2045*. Bkkbn.o.Id. Diakses Tanggal 27 Agsutus 2021. <https://www.bkkbn.go.id/detailpost/indonesia-cegah-stunting>
- Dunn, W. N. (2000). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Fahzira, E. (2020). *Implementasi Kebijakan Penurunan Stunting Di Kabupaten Kampar*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Fitri, L. (2018). *Hubungan Bblr Dan Asi Eksklusif Dengan Kejadian Stunting Di Puskesmas Lima Puluh Pekanbaru*. Jurnal Endurance, 3(1), 131. <https://doi.org/10.22216/jen.v3i1.1767>
- Hermawati, & Sastrawan. (2020). *Analisis implementasi kebijakan program penanggulangan stunting terintegrasi di Kabupaten Lombok Utara*. Jurnal Kesehatan Qamarul Huda, 8(2), 48–54
- Husein, Umar, 1999. *Riset Sumber Daya Manusia Dalam Organisasi*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Kementerian Kesehatan RI. (2016). *Infodatin Situasi Balita Pendek*. Jakarta: Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan RI. (2018). *Buletin Jendela Data dan Informasi Kesehatan Edisi 1 Semester 1 Tahun 2018*. Jakarta: Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan. (2018). *Situasi Balita Pendek Stunting di Indonesia*. Jakarta: Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian PPN/Bappenas. (2019, Desember 18). *Turunkan Stunting di Angka 14 Persen di 2024, Menteri Suharso Dorong Kerja Sama Lintas Sektoral*. Dipetik Juni 2022, 12, dari [bappenas.go.id](https://www.bappenas.go.id): <https://www.bappenas.go.id>
- Kementerian Sekretariat Republik Indonesia. (2021, Desember 15). *Angka Prevalensi Stunting tahun 2020 Diprediksi Turun*. Dipetik Juni 12, 2022, dari [stunting.go.id](https://stunting.go.id): <https://stunting.go.id>
- Kemntrian Kesehatan. (2019, November 27). *Kemntrian Kesehatan Fokus pada Pencegahan Stunting*. Dipetik Agustus 29, 2021, dari <https://indonesia.go.id>
- Mahsyar, A. (2011). *Masalah Pelayanan Publik di Indonesia dalam Prespektif Administrasi Publik*. Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan, 1(2).

- Makmur hermanto, 2013. *Pengantar Analisis Kebijakan Public*. (penyunting Darwin Muhajir). Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Morissan. 2008. *Manajemen public relations: Strategi menjadi Humas Profesional*. Jakarta: Kencana Prenada Media group.
- Mulawarman. (2021). *Implementasi Program Gizi Terhadap Angka Stunting Pada Masa Pandemi Covid 19 Di Kabupaten Lahat*. Thesis. STIK Bina Husada Palembang
- Nirwanasari. (2020). *Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Di Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa*. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Makasar
- Novianti, R., Purnaweni, H., & Subowo, A. (2021). *Peran Posyandu Untuk Menangani Stunting Di Desa Medini Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus*. Journal of Public Policy and Management Review. Vol 10, No 3 (2021). <https://doi.org/10.14710/jppmr.v10i3.31425>
- Nurkholilah, D. (2021). *Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Dalam Upaya Pemenuhan Kebutuhan Fisiologi Masyarakat Di Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi*. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Makassar
- P2PTM Kemenkes RI. (2018, April 10). *Cegah Stunting dengan Perbaikan Pola Makan, Pola Asuh dan Sanitasi*. Dipetik Agustus 29, 2021, dari <http://www.p2ptm.kemkes.go.id>
- Pedoman Pelaksanaan Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi Di Kabupaten/ Kota. Edisi November 2018.
- Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 97 Tahun 2020 Tanggal 15 Desember 2020, Tentang Pencegahan Dan Penanganan Stunting Di Kabupaten Sumbawa.
- Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 97 Tahun 2020 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Stunting Di Kabupaten Sumbawa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 83 tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi.
- Ponto, A. M., Pioh, N. R., & Tasik, F. (2016). *Implementasi Kebijakan Program Pembangunan Berbasis Lingkungan Membangun Prasarana Fisik, Sosial dan Ekonomi Di Kelurahan Karombasan Selatan Kecamatan Wanea Kota Manado*. Jurnal Ilmu Sosial dan Pengelolaan Sumberdaya Pembangunan. Edisi XX (Januari- Februari 2016). Vol.3 No 20 (2016).
- Purba, Sri Hajjah, (2019), *Analisis Implementasi Kebijakan Penurunan Stunting di desa Secanggang Kabupaten Langkat*. Skripsi. Program Studi Ilmu Kesehatan masyarakat Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Medan
- Puspitasari, N. (2017). *Implementasi Kebijakan Perlindungan Terhadap Anak di Kota Pontianak*. Jurnal S1 Administrasi Negara. Vol 6. No 2 (2017) <http://dx.doi.org/10.26418%2Fpublika.v6i2.1532>.
- Rahmandiani, R. D., dkk. (2019). *Hubungan Pengetahuan Ibu Balita Tentang Stunting Dengan Karakteristik Ibu dan Sumber Informasi di Desa Hegarmanah Kecamatan Jatiningor Kabupaten 96 Sumedang*. Jurnal Sistem Kesehatan. Vol 5, No 2 (2019) <https://doi.org/10.24198/jsk.v5i2.25661>
- Sekretariat Percepatan Pencegahan Stunting. (2019). *Strategi Nasional Percepatan Pencegahan Anak Kerdil*. Jakarta Pusat: Sekretariat Percepatan Pencegahan Stunting.
- Siagian Sondang, P. 2015. *Sistem Informasi Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.
- Sumarni, D., Fajar, N. A., & Hasyim, H. (2022). *Analisis Faktor Pencegahan Stunting di Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2022*. Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi.
- Suryana, S. E. (2009). *Implementasi Kebijakan Tentang Pengujian Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Aceh Tamiang*. Skripsi. Universitas Sumatra Utara
- Widianto, Bambang. (2018). *Panduan Kovegerensi Program / Kegiatan Percepatan Pencegahan Stunting*, Buku pegangan Resmi Organisasi Perangkat Daerah. Jakarta.
- Wiguna, Aria Raja. Vol 6, No 1 (2022): Pebruari, 2022 - *Artikel Implementasi Kebijakan Penanggulangan Stunting Oleh Dinas Kesehatan Di Kabupaten Sukabumi*.
- Wulandari, Ratih Sri. 2019. *Implementasi Kebijakan Pencegahan Stunting Di Kabupaten Bandung Barat*. Jurnal social dan Politik: Volume XXIV, No.2.